

**PELANGGARAN DAN SANKSI ADAT DELIK ASUSILA DI
MASYARAKAT SUKU BUNGGU (TO PAKAVA)**

NENENG ROMANA / D 101 10 015

ABSTRAK

Komunitas adat suku bunggu (To Pakava) sampai saat ini masih memberlakukan aturan-aturan adat yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan dan proses pelaksanaan penyelesaiannya dilaksanakan melalui proses penyelesaian peradilan adat yang mana diselesaikan di Bantaya, pelaksanaan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai akan dinamakan terlebih dahulu dengan cara musyawarah, apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata sepakat maka si pelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat atau pemenuhan kewajiban adat. Alasan mengapa komunitas adat suku bunggu (To Pakava) menyelesaikan perkara-perkara yang tergolong dalam tindak pidana kesusilaan karena masih ada sebagian pelanggaran yang termasuk delik kesusilaan tidak diatur di dalam KUHP, misalnya dalam delik perzinahan yang mana telah di atur dalam pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanyamerupakan suatu kejahatan (delik perzinahan) apabila para pelaku atau salah satupelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. Sebagai sub-cultural dan cara ber hukum komunitas adat Suku Bunggu (To Pakava) perbuatan kesusilaan dan proses penyelesaiannya, baik diselesaikan dengan bertindak sendiri, ataupun melalui proses pengadilan negara, menunjukkan terjadinya ketidak cocokan antara nilai-nilai hukum yang termuat dalam aturan hukum negara dengan nilai-nilai hukum yang senyatanya termuat dalam kehidupan hukum masyarakat.

Kata Kunci : Kesusilaan, Komunitas adat, peradilan adat, KUHP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya dengan keragaman suku yang mendiami nusantara ini, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Misalnya suku Toraja, suku Kajang di Sulawesi Selatan, atau suku Mori, suku Balantak, suku Kulawi yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, demikian pula Suku Bunggu (*To Pakava*) yang bertempat di daerah Propinsi Sulawesi Barat.

Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Marcus Tullius Cicero (106-43SM) menyatakan "*Ibi ius ibi societas*" yang bermakna "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum".¹

Keberadaan aturan-aturan hukum adat banyak terdapat di daerah-daerah tertentu, misalnya komunitas adat suku bunggu yang terdapat di daerah Sulawesi Barat. Asal-usul suku bunggu ini sebenarnya berasal dari Gunung Pinambani dan gunung pangalabolo.

Suku Bunggu ini aslinya adalah Suku Pakava, yang berciri khas berbahasa da'a dan

¹Yance Arizona "Hak Ulayat Masyarakat Adat sebagai Hak Konstitusional." Makalah. Simposium Masyarakat Adat. Jakarta, 27 Juni 2012, Hlm 1.

inde atau disebut dengan “Topo da’a dan Topo inde”, Suku Bunggu adalah nama yang diberikan kepada komunitas suku yang mendiami daerah pegunungan di Mamuju Utara dengan pola hidup nomaden, arti dari suku bunggu yaitu komunitas yang hidup di tebing-tebing/bingge, yang di sebut dengan tori bingge/binggi, sehingga komunitas ini lebih dikenal dengan masyarakat mamuju utara dengan sebutan suku bunggu. Suku bunggu juga biasa disebut dengan Suku Pakava /To Pakava (Hunian bagi orang-orang yang datang). *To Pakava* (Orang Pakava) adalah masyarakat hukum adat (masyarakat adat). Wilayah adatnya di Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat. Secara tradisional Orang Pakava hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut *Boya*, yang masing-masing dipimpin oleh *Totua nu Boya* yang memimpin penyelenggaraan peradilan adat dan *Bangunasa* yang memimpin perladangan padi.

Secara administratif *Boya-boya* Pakava di Kabupaten mamuju utara dibagi 5 desa yaitu berada di Desa Tumpaure dusun saluwira dan dusun bambarano, Desa Volai, Desa Rio Pakava (Pakava dan Ngovi), Desa Polewali di dusun Kalibamba, serta desa Kalola di dusun Duria Sulapa.

Dikomunitas suku ini banyak aturan-aturan adat, misalnya urutan dalam delik asusila, Adapun pelanggaran-pelanggaran asusila dalam hukum ada mereka secara garis besar antara lain misalnya:

- 1) Adanya hubungan cinta (pacaran) antara seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang belum terikat perkawinan.
- 2) Antara pria dan wanita yang sedang bercinta tersebut terjadi hubungan seksual yang didasarkan atas suka sama suka dan si pria telah berjanji akan mengawini si wanita.
- 3) Hubungan seksual yang telah dilakukan menyebabkan si perempuan menjadi hamil. Si pria memungkiri janji untuk mengawini si perempuan tanpa alasan.

Pada nyatanya ditemukan pengaruh kesadaran hukum adat dalam penyelesaian

tindak pidana asusila, misalnya tetua-tetua adat ketika menyelesaikan kasus-kasus delik asusila, menempuh jalan penyelesaian melalui jalur peradilan adat dengan cara melakukan perdamaian, dan pelaku harus dinikahkan ditambah membayar denda. Besar denda yang diberikan kepada pelanggar hukum adat asusila disesuaikan dengan kesalahan dan hasil keputusan musyawarah warga. Untuk pelanggaran yang tergolong ringan, denda dapat dibayar jika penerima denda telah ikhlas menerima denda dan mengakui kesalahannya.

Hukum adat dan peradilan adat lahir dan berkembang dari kesadaran kolektif masyarakat dimana kekuatannya tidak berasal dari mekanisme legal formal, melainkan tumbuh dan berkembang melalui penghormatan masyarakat atas hukum-hukumnya sebagai perwujudan hubungan harmonis antara sesama manusia, dengan alam dan dengan penciptanya, hukum adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan tatanan masyarakat untuk mewujudkan harmoni, ketentraman, aman dan berkeadilan.

Ada beberapa alasan mengapa perlunya didorong proses penyelesaian sengketa atau konflik adat melalui jalur peradilan adat yaitu :

1. Di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia.
2. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa secara damai cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan, sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.
3. keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai kedesa-desa terpencil.

Keberadaan peradilan adat menjadi institusi penting dalam lingkup masyarakat adat, khususnya di daerah komunitas masyarakat suku bunggu, sehingga diharapkan hukum adat yang berlaku di dalam komunitas

adat suku bunggu (To Pakava) bisa menjadi subangsih dalam sisitem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jenis-jenis pelanggaran delik asusila dalam hukum adat komunitas Suku Bunggu (To Pakava)?
2. Bagaimanakah Jenis-jenis dan bentuk pelaksanaan sanksi tindak kejahatan delik asusila dalam hukum adat komunitas Suku Bunggu (To Pakava)?

II. PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Pelanggaran Delik Asusila Dalam Hukum Adat Masyarakat Suku Bunggu (*To Pakava*)

1. Jenis Aturan Adat Dalam Delik Asusila Komunitas Adat Suku Bunggu (*To Pakava*)

Jenis pelanggaran adat terhadap delik asusila dalam komunitas Suku Bunggu (*To Pakava*) didaerah Mamuju Utara, mempunyai kesamaan di masing-masing daerah Mamuju Utara misalnya didesa Tampaure dusun Saluwira dan dusun Bambarano, desa Volai, desa Rio Pakava (Pakava dan Ngovi) , desa Polewali di dusun Kalibamba, serta desa Kalola didusun Duria Sulapa , Seperti misalnya:

- a) Membuat perempuan hamil diluar ikatan pernikahan yang mana pelakunya tidak bertanggung jawab (Vone)
- b) Seorang laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan yang di dasarnya suka sama suka kemudian dia tidak mau menikahnya gadis tersebut (Nibore)
- c) Melarikan istri orang atau berzina dengan istri orang dan membawa lari perempuan yang disukainya (Navualo)
- d) Memperkosa seorang wanita kemudian dibunuhnya (Poampi Dayo)
- e) Memaksa seorang wanita berhubungan badan /perkosaan (Nobaga Besi)

Berdasarkan pada jenis pelanggaran adat delik asusila diatas pada pokoknya berintikan pada penghargaan dan

penghormatan harkat dan martabat seorang perempuan, oleh karenanya hubungan seksual dan upaya merusak rumah tangga orang lain, pihak yang dipermalukan diberi hak mengambil reaksi adat terhadap pihak yang bersalah yang melanggar harga diri orang lain. Meskipun didalam melaksanakan sanksi itu, kemungkinan bertentangan dengan aturan hukum formal yang ada.

Apabila kita kaji dari sudut pandang pemikiran hukum dinamis, keadaan ketidak sesuaian antara hukum pidana negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) , merupakan fenomena hukum yang memerhatikan .

Menurut Barda Nawawi Arif, “adanya kesengajaan dan ketidak sesuaian (gap/discrepansy) atau perbedaan nilai atau kepentingan , ide-ide/pola pikir, diantara yang dimuat oleh hukum negara dengan yang ada dan dihayati oleh para anggota masyarakat, tidak mustahil dapat menjadi faktor timbulnya ketidak puasan dalam praktek penegakan hukum. bahkan dapat pula menjadi faktor penyebab timbulnya korban (‘*faktor victimogen*’) maupun timbulnya delik kejahatan lain (*factor criminogen*)²

Dalam jenis aturan komunitas adat suku bunggu (*To Pakava*), dapat dimaksudkan sebagai bagian upaya untuk menemukan kembali nilai-nilai hukum pidana yang hidup di masyarakat tersebut. Guna mendukung pembinaan hukum pidana nasional yang secara substansial dan dogmatis, berpangkal pokok, atau bersumber pada pandangan dan konsep nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat Indonesia sendiri. Menurut Mulyadi salah satu karakteristik oprasional hukum pidana indonesia pada masa datang, adalah hukum pidana yang tidak mengabaikan aspek-

²Barda Nawawi arif , Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana,Bandung, citra aditiya bakti 1998, Hlm 102

aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.³

Debat tentang hukum adat sebagai sumber hukum bersifat positif, merupakan perbincangan yang beraroma dan bercitarasa akademik, mungkin akan berkepanjangan dan tidak diketahui kapan akan berakhir. Dalam praktek penegakan dan penerapan hukum pidana di pengadilan, hukum pidana adat dijadikan sebagai sumber hukum bersifat positif telah menjadi kenyataan.

Menurut Mulyadi di samping dapat menjadi sumber hukum yang bersifat positif, nilai-nilai yang bersumber pada hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat, dapat juga berfungsi sebagai sumber hukum negatif, dalam arti bahwa nilai-nilai tersebut dapat dijadikan alasan pembenar (*rechtvaardigingssgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan atau dapat berfungsi sebagai alasan-alasan yang memperingan pembedaan dan sebaliknya mungkin justru menjadi alasan memberatkan pembedaan.⁴

2. Arti Kesusilaan Dalam Komunitas Adat Suku Bunggu (To Pakava)

Telah dijelaskan oleh komunitas adat Suku Bunggu (To Pakava), dari hasil penemuan lapangan, kepala adat desa Ngovi mengungkapkan bahwa kesusilaan merupakan pembeda antara manusia dan binatang, yang membedakan antara kebajikan dan keburukan.

Ungkapan ini juga telah dijelaskan oleh Andi Zainal Abidin yaitu 'pandangan hidup yang mengandung etika pembedaan antara manusia dan binatang, dengan adanya rasa harga diri, harkat dan martabat, serta kehormatan kesusilaan yang melekat pada manusia, yang mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban, untuk dijadikan pedoman

hidup, guna menjaga dan mempertahankan atau meningkatkan harkat dan martabat manusia dan kelompoknya.⁵

Perbuatan kesusilaan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan membatasi pergaulan antara lelaki dengan perempuan, dengan cara memperbaiki, hati, mulut, busana, gerak gerik, dan pergaulan antara sesama wanita dan laki-laki.

B. Jenis-jenis dan Bentuk Pelaksanaan Sanksi Tindak Kejahatan Delik Asusila Dalam Hukum Adat Komunitas Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava)

Berlakunya hukum pidana adat di samping hukum pidana nasional menyebabkan terjadinya dualisme hukum pidana di Indonesia, seperti yang terjadi di daerah Mamuju Utara dalam komunitas adat Suku Bunggu, dengan berlakunya kedua hukum tersebut secara berdampingan akan memberikan dampak positif dimana akan lebih menjamin setiap kejahatan dapat di jerat oleh kedua sistem hukum tersebut, oleh karena itu hendaknya terhadap pengadilan adat mesti di pertahankan eksistensinya dan dijaga kewibawaannya sehingga penerapannya didalam kehidupan dapat berjalan langgeng dan tidak terkikis seiring dengan perubahan zaman.

Kalangan komunitas adat atau Suku Bunggu (*To Pakava*) yang berada di desa Ngovi ketika terjadi suatu kriminal seperti penganiayaan berat atau pelanggaran-pelanggaran lainnya masih dapat diselesaikan melalui pengadilan adat yang bukan hanya mendamaikan tetapi juga dapat menjatuhkan sanksi berupa denda.

Haedar Laudjeng mencatat bahwa, sekitar tahun 1997 sejumlah warga masyarakat adat Pakava Ngovi meminta pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan terhadap salah seorang warganya yang melakukan penganiayaan yang tergolong berat terhadap salah seorang warga pakava. Alasan mereka bahwa, karena peristiwa ini terjadi diantara

³Mulyadi, Proyeksi hukum pidana materiel Indonesia di masa datang. Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum pidana, fakultas hukum universitas di ponedgoro, Semarang, 24 februari, 1990, Hlm.15.

⁴*Ibid.* Hlm. 17

⁵Andi Zainal Abidin, Siri kriminalitas dan pembinaan hukum, dalam Ahmad Ube, Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Yasrif Matombe, Jakarta, 2008, Hlm. 115

sesama orang pakava, sehingga polisi dilarang ikut campur.⁶

Pada umumnya orang pakava berpendapat, bahwa campur tangan polisi hanya dibutuhkan ketika komunitas masyarakat adat tidak sanggup lagi mengadili pelaku tersebut. Mereka menganggap bahwa aturan hukum negara merupakan langkah ke dua bagi mereka untuk menangani kasus yang terjadi di daerahnya, selama mereka mampu menyelesaikannya secara adat mereka akan menempuh jalur adat. Cara ini sampai sekarang masih diterapkan oleh komunitas suku bunggu.

1. Jenis-Jenis Pemberian Sanksi Dalam Hukum Adat Komunitas Suku Bunggu (To Pakava)

Pemberian sanksi di 5 (Lima) desa di Mamuju Utara tempat komunitas adat Suku Bunggu (To Pakava), yaitu:

a. Pemberian sanksi di desa Rio Pakava (Pakava dan Ngovi)

1) Membuat perempuan hamil diluar ikatan pernikahan. Menghamili seorang perempuan termasuk pelanggaran adat dalam komunitas adat suku bunggu (To Pakava), sehingga jika laki-laki yang menyebabkan hamilnya perempuan tersebut maka laki tersebut akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika ia menolak untuk bertanggung jawab maka lelaki tersebut akan diberikan denda, yang di sebut dengan denda *Vone*. Denda *vone* terdiri dari

- a) 20 piring
- b) 2 guma / sejenis parang antik jika tidak ada akan di gantikan 4 parang biasa
- c) 2 ekor babi
- d) 2 buah dula

2) Seorang laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan yang di dasarkan suka

sama suka akan dinikahkan, tetapi jika seorang laki-laki tidak mau menikahinya gadis tersebut (Nibore), maka akan diberikan sanksi denda misalnya:

- a) 2 ekor babi
- b) 1 buah guma
- c) 1 kain putih
- d) 7 piring
- e) 1 Dula

3) Melarikan seorang perempuan atas dasar suka sama suka akan di panggil dan kemudian dikawinkan, jika membawa lari istri orang atau berzina dengan istri orang atas keinginan mereka berdua, maka masing-masing mereka berdua akan diberikan denda *Navualo*. Denda *Navualo* terdiri dari

- a) 50 piring
- b) 5 ekor babi
- c) 5 parang atau guma
- d) 1 mbesa jika tidak ada mbesa maka digantikan dengan kain putih/ balacu
- e) 5 buah dula

4) Memperkosa seorang perempuan kemudian dibunuhnya akan diberikan hukuman *Poompa dayo* yaitu hukuman yang diberikan pelaku yang telah memperkosa, yang mana cara pemberian hukumannya seorang pelaku akan diikat bersama dengan orang yang telah diperkosa dan di bunuhnnnya kemudian dikubur yang mana pelaku sebagai alas tikar dalam kubur.

5) Memaksa seorang perempuan berhubungan badan/perkosaan (*Nobaga Besi*), pelaku akan di paksa untuk dinikahkan kepada seorang wanita tersebut, jika tidak mau bertanggung jawab maka pelaku akan diberikan sanksi denda *navualo*.

b. Pemberian Sanksi perbuatan asusila di desa Volai, desa Tampaure dusun Saluwira dan dusun Bambarano, desa Bambalamotu dusun Durian Sulapa

Pemberian sanksi perbuatan asusila di daerah tersebut mempunyai masing-masing

⁶Hedar Laudjeng, Pertimbangan peradilan adat, Seri pengembangan Wacana Jakarta, HUMA, 2003, Hlm. 14

perbedaan dalam memberikan sanksi, perbedaannya yaitu biasanya kepala adat (*Totua Nuboya*) di daerah-daerah tersebut menentukan sanksi tersebut sesuai dari hasil musyawarah yang telah disepakati bersama oleh tokoh-tokoh adat, dan persyaratannya tidak jauh beda dengan pemberian sanksi di desa ngovi dan pakava. Hanya saja di daerah tersebut tidak ada ketentuan aturan pemberian sanksi yang pasti seperti yang ada di daerah Ngovi dan Pakava, di daerah tersebut hanya berdasarkan apa yang telah di taksirkan dan dijatuhkan oleh ketua adat (*Totua Nuboya*) yang sudah telah disepakati bersama.

Pemberian sanksi yang telah di jelaskan diatas mempunyai kekuatan hukum tetap dalam komunitas mereka di dalam menyelesaikan atau mengadili tindak kejahatan asusila, pelaku akan diadili di tempat pertemuan komunitas yang disebut dengan *Bantaya*. *Bantaya* adalah tempat pertemuan dan tempat pengambilan keputusan tertinggi didalam komunitas. Tempat bermusyawarah sekaligus tempat berlangsungnya prosesi peradilan adat, dan yang menyelesaikan atau mengadili suatu perkara adalah ketua adat (*Totua Nuboya*).

2. Tugas Organisasi Peradilan Adat Dalam Komunitas Adat Suku Bunggu (To Pakava) Sebagai Penyelenggara Prosesi Peradilan Adat.

a. Tanggung jawab dari pemangku adat

Para pemangku adat yang terlibat dalam penyelesaian perkara memiliki tanggung jawab yang besar. Para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemangku adat / *totua nuboya* untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai. Para pemangku adat bertanggung jawab memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam peradilan adat dipegang teguh dalam setiap proses penyelesaian perkara secara adat. Tanggung jawab utama dari pemangku adat tersebut adalah :

1) Melaksanakan proses pradilan adat

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari penerima laporan, memeriksa

duduk persoalan pada sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian keputusan peradilan adat serta memastikan bahwa keputusan peradilan adat itu dilaksanakan.

2) Memutuskan dengan adil

Para pemangku adat dalam komunitas suku Bunggu harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses pradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bertikai, dimana kepuasan yang di ambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musawarah.

3) Melindungi hak-hak para pihak bertikai

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bertikai mulai proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan keputusan di persidangan. Dalam perkara yang korbannya adalah perempuan atau anak-anak, para pemangku adat harus memastikan adanya perlakuan khusus.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Hukum pidana adat sebagai hukum tidak tertulis masih mempunyai peranan dalam pembaharuan hukum pidana kedepan. Nilai-nilai hukum pidana adat yang tidak terkoodifikasi yang hidup ditengah-ditengah masyarakat masih digunakan dalam melaksanakan suatu penyelesaian konflik yang memberikan rasa keadilan.
2. Kisi-kisi ketertiban dan kedamaian komunitas adat Suku Bunggu (*To Pakava*) dapat di aplikasikan sebagai salah satu sumber hukum positif dalam rangka penyusunan KUHP yang baru. Kehidupan mereka mempunyai suatu aturan hukum yang berlaku dan ditati bersama oleh masyarakat adat Suku Bunggu (*To pakava*). Larangan adat tentang tindak pidana delik kesusilaan masih hidup dalam komunitas mereka, misalnya dalam perbuatan asusila

yang diselesaikan dengan jalan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat atau kepala adat.

3. Perbuatan kesusilaan yang disertai dengan pemberian sanksi-sanksinya yang terjadi dalam komunitas Suku Bunggu (*To Pakava*) meliputi antara lain :
 - a) Membuat wanita hamil diluar ikatan pernikahan yang mana pelakunya tidak bertanggung jawab (*vone*).Pemberian sanksinya di berikan denda berupa: 20 piring; 2 guma (sejenis parang antik) jika tidak ada akan di gantikan 4 parang biasa; 2 ekor babi; 2 buah dula.
 - b) Seorang laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang di dasarkan suka sama suka kemudian dia tidak mau menikahi gadis tersebut (*Nibore*), denda yang di berikan: 2 ekor babi; 1 buah guma; 1 kain putih; 7 piring; 1 dula.
 - c) Melarikan istri orang atau berzina dengan istri orang dan membawa lari perempuan yang disukainya (*Navualo*). Denda yang di berikan : 50 piring; 5 ekor babi; 5 parang atau guma; Mbesa jika tidak ada mbesa maka digantikan dengan kain putih/ balacu; 1 Buah dula.
 - d) Memperkosa seorang wanita kemudian dibunuhnya (*Poampi Dayo*) sanksi yang diberikan yaitu akan diikat bersama dengan orang yang telah diperkosa dan di bunuhnnya kemudian dikubur yang mana pelakunya sebagai alas tikar dalam kubur si korban.
 - e) Memaksa seorang wanita berhubungan badan/perkosaan (*Nobaga Besi*), sanksi yang di berikan pelaku akan di paksa untuk dinikahkan kepada seorang wanita tersebut dan akan diberikan sanksi denda *navualo*

B. Saran

1. Ketertiban dan kedamaian masyarakat Suku Bunggu (*To Pakava*) di perlukan upaya pengembangan pemikiran kearah sistem pelaksanaan peradilan pidana , yang lebih rasional dan terbuka terhadap suatu perubahan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga kontrol sosial tidak

hanya ditentukan oleh pembuat undang-undang, tetapi juga ikut berperannya pranata hukum oleh pranata hukum yang hidup didalam masyarakat.

2. Diperlukan upaya pengembangan pemikiran ke arah hukum pidana, sebagai produk politik yang berdasarkan sublimasi nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad ubbe ‘*Hukum pidana adat kesusilaan malaweng, kesinambungan dan perubahan*’ Yasrif Watampone , Jakarta, 2008
- Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana* 1. PT. Rajaa Grafindo Persada, Jakarta , 2008.
- Alvin S,Johnson, *Sosiologi Hukum*. Ctk 3, PT Rineka Cipta, Jakarta , 2006.
- Andi Hamzah ‘*Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan*’,
cv.sumber ilmu jaya, jakarta, 1998
- Andi Hamjah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT. Rineka cipta. Jakarta , 1991
- Bambang, Sunggono,. *Metodologi penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hilman Adi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, Pustaka Diklat Alumni, Bandung, 1985.

B. Peraturan Perundangan-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia. Undang-Undang Sementara 1950
- Indonesia. Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Indonesia . Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang W etboek Van Strarecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Indonesia. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No 9) Tentang Univikasi Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Sipil)

C. Bahan Referensi

- H.andi Ando.A.Pelang. ‘*He’imo To Pakava(Inilah orang Pakava)*’ Disampaikan dalam Seminar dan lokakarya pengolahan hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.Diselenggarakan oleh yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia di mamuju, 5-7 Maret 2002.

D. Internet

- Aryafatta** ‘*Suku Bunggu Mamuju Utara*’ (online)
<http://aryafatta.wordpress.com/2008/01/14/suku-bunggu-mamuju-utara/> . (Diakses 14 januari, 2008)

BIODATA

NENENG ROMANA, Lahir di Palu, 10 Juni 1992, Alamat Rumah Perumahan Dosen Blok D6/9 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285343885219, Alamat Email nenengromana_justice@yahoo.com

